



PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI GORONTALO

Yustina Hiola¹ Ervina Harun²

1.2., Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; uchihiola@gmail.com, harunervina@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 22 November 2021, Disetujui: 24 Desember 2021, Publish 29 Desember 2021

Abstract:

The purpose of this study is to find out how the Influence of Characteristics, Complexity and Audit Findings on the Level of Disclosure of Local Government Financial Statements in Gorontalo Province. This study uses multiple linear regression where the dependent variable is the level of disclosure of local government financial statements and the independent variables are the size of the local government, regional independence, transfer income, number of regional apparatus organizations, legislative size and audit findings. From the results of research conducted partially the size of the local government has a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020, regional independence has a significant effect on the level of Disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020, transfer income has no effect significantly to the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020, the number of regional apparatus organizations did not significantly affect the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020, the size of the legislature had a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020 and audit findings have a significant effect on the level of disclosure of local government financial statements in Gorontalo Province in 2018-2020

Keywords: *Characteristics, Complexity, Audit Findings, Disclosure*

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode regresi Linear berganda dimana variabel terikat adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel bebas adalah ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, pendapatan transfer, jumlah organisasi perangkat daerah, ukuran legislatif dan temuan audit. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020, kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020, pendapatan transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah

daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020, jumlah organisasi perangkat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020, ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020 dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Kata kunci : Karakteristik, Kompleksitas, Temuan Audit, Pengungkapan

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dimana menurut Kasubag Humas menyatakan bahwa terdapat masalah yang sering terjadi pada pemerintah daerah. Pada umumnya tidak terkecuali pemerintah daerah di provinsi Gorontalo yaitu lemahnya (sistem pengendalian intern) SPI dan Ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan per-undang-undangan yang berlaku masih menjadi dua masalah yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah bersama dengan sistem penunjang pemerintahan seperti inspektorat, BPKP dan BPK guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan *agency theory*, pengelolaan pemerintahan daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Halim, 2018). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib memper-

tanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan cara menyusun laporan keuangan.

Menurut Mahsun (2018) Laporan Keuangan Daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal.

Pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah karakteristik merupakan salah satu pengaruh dalam tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2014) Karakteristik pada pemerintah daerah melalui ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah dan pendataan transfer dapat menjelaskan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor atas kepatuhan pengungkapan yang wajib.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh

kompleksitas pemerintah daerah. Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin kompleks sebuah pemerintah daerah dibutuhkan maka sebuah pengungkapan yang lebih besar akan membantu pengguna laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Candra, 2015).

Kompleksitas pada pemerintah daerah menggunakan jumlah OPD dan ukuran legislatif. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing OPD akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menjadi laporan keuangan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi/kabupaten/kota (Renyowijoyo, 2013). Ukuran legislatif menggunakan proksi jumlah anggota DPRD untuk mengukur ukuran legislatif. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN, salah satu indikatornya dapat diukur dari hasil audit LKPD tahunan oleh BPK. Semakin banyak

temuan yang diperoleh BPK atas penyajian LKPD maka sebuah pemerintah menandakan banyaknya perbaikan sistem yang harus diperbaiki oleh pemerintah tersebut. Selain itu LKPD juga harus memuat pengungkapan yang memadai mengenai sumber daya daerah dan pengelolannya. Hasil dari pemeriksaan oleh BPK adalah berupa opini, temuan, kesimpulan dalam bentuk rekomendasi perbaikan SPI (sistem pengendalian intern), koreksi pencatatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masalah SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi temuan yang tidak terhindarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Berikut merupakan salah satu temuan BPK terhadap kondisi yang berkaitan dengan SPI. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditemukan BPK pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan dan pengawasan atas kas daerah oleh pemerintah Provinsi Gorontalo belum memadai b. Penerimaan dan penggunaan dana CSR dari Bank SulutGo pada Dinas Kesehatan dan Biro Pemerintahan dan Kesra pemerintah Provinsi Gorontalo belum di sajikan dalam laporan keuangan senilai Rp. 901.500.000,00. c. Kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja daerah yang tidak sesuai dengan subtansi kegiatan senilai Rp. 11.548.582.940,00. Pada tahun 2019 di

temukan sebagai berikut: a. Pengelolaan Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum optimal. b. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga belum tertib. Pada tahun 2020 di temukan sebagai berikut: a. Belanja pemerintah Provinsi Gorontalo salah dalam mengklasifikasi penganggaran belanja daerah. b. Aset Pemerintah Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya memadai dalam mengelola kas di kas daerah. c. Kewajiban pemerintah provinsi Gorontalo belum menatausahakan utang beban transfer secara memadai

Pada Peraturan Perundang-undangan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah provinsi Gorontalo pada tahun 2018-2020. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Pembayaran Gaji, tunjangan, dan honor Tidak sesuai ketentuan. b. Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan penigkatan jalan pada dinas pekerjaan umum Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018. c. Hibah kepada organisasi, kelompok masyarakat dan bantuan sosial kepada organisasi masyarakat belum dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh penerima. Pada tahun 2019 di temukan ketidakpatuhan sebagai berikut: a. Kekurangan penerimaan bunga deposito pada Bank rakyat Indonesia (BRI) Cabang

Gorontalo. b. Realisasi belanja pegawai atas tunjangan fungsional ASN yang melaksanakan cuti besar dan tugas belajar pada pemerintah Provinsi Gorontalo tidak sesuai ketentuan c. Kekurangan volume atas tujuh paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD dan denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan belum di pungut. Pada tahun 2020 ditemukan ketidakpatuhan antara lain: a. Satuan Pendidikan Menengah Negeri tidak menyampaikan pertanggungjawaban barang dan jasa. b. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) menganggarkan dan merealisasikan belanja barang dan jasa untuk beasiswa bagi mahasiswa miskin/berprestasi tidak sesuai ketentuan. c. Dinas Kesehatan pemerintah Provinsi Gorontalo dan RS Umum daerah dr. Hasri Ainun Habibie belum memadai melaksanakan pengelolaan perseediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas LKPD di Provinsi Gorontalo TA 2018-2020 ini menunjukkan hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan bahwa kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan wajib terhadap SAP yang berada di tujuh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan meng-analisis pengaruh ukuran pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan meng-analisis pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan transfer terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan meng-analisis pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan dari tujuh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang telah diaudit oleh (BPK) Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria-kriteria menurut Sugiono (2013) antara lain sebagai berikut: LKPD kabupaten/kota pada tahun 2018-

2020 yang telah diaudit oleh BPK, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, data jumlah SKPD sebagai entitas akuntansi tahun 2018-2020, laporan keuangan pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada periode tahun 2018-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif. Pada karakteristik pemda menggunakan tiga indikator:

1. ukuran pemerintah daerah
2. kemandirian daerah
3. pendapatan transfer

Pada kompleksitas pemda menggunakan dua indikator:

1. jumlah OPD
2. ukuran legislatif

Sedangkan pada temuan audit diukur dengan jumlah temuan audit. Tahapan dalam pengujian menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Teknik analisis data juga menggunakan model regresi linier berganda. Analisis

regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi. Model regresi linear berganda tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y1 = Tingkat Pengungkapan LKPD

a = Konstanta

β_1 - β_6 = Koefisien regresi

X1 = Koefisien Ukuran pem-da

X2 = Koefisien Tingkat kema-ndirian daerah

X3 = Koefisien Pendapatan Transfer

X4 = Koefisien Jumlah OPD

X5 = Koefisien Ukuran Legislatif

X6 = Koefisien Regresi Temuan audit

e = *error trem*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2020 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan pada penelitian ini menggunakan sistem *scoring*. Sistem *scoring* merupakan sistem pemberian skor dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan SAP.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda koefisien deter-minasi-nya (R Square) sebesar 0,627. Artinya variabel bebas pada penelitian ini dapat menjelaskan yakni ukuran pemerintah daerah kemandirian daerah, pendapatan transfer, jumlah OPD, ukuran legislatif serta temuan audit dapat menjelaskan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda sebesar 62,7%. Adapun 6 variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas karakteristik pemda diantaranya (X1) Ukuran pemda, (X2) Kemandirian daerah, (X3) pendapatan transfer, kompleksitas pemda diantaranya (X4) Jumlah OPD, (X5) Ukuran Legislatif dan (X6) Temuan Audit variabel terikat (Y) Tingkat pengungkapan LKPD.

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan total aset dalam neraca dapat menjelaskan pada tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar -3,339 lebih besar dari t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas maka ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-

2020. Ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar total aset yang didapatkan dari neraca yaitu total aset lancar dan non lancar. Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Rahayu 2016 mengenai Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada penelitian Candra (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah juga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah jika diukur dengan ukuran total aset dalam neraca maka semakin besar total aset daerah sangat menentukan pelaporan keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin banyak total aset yang dimiliki maka akan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi sehingga pengungkapan informasi menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Berdasarkan *agency theory*, bahwa pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan pengelolaan dilaku-

kan dengan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap ketentuan perundang-undangan.

2. Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Di Provinsi Gorontalo 2018-2020

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingginya tingkat kemandirian keuangan sangat dipengaruhi oleh jumlah PAD. Kemandirian daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah pada PAD dan total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa kemandirian daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan bahwa nilai t hitung sebesar 4,163 lebih besar t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas. Maka kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Albab (2019), mengenai Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

di Pulau Jawa. Dalam penelitian albab menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian ini bertolak belakang dengan Penelitian Candra (2015) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan penelitian menurut Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa tingginya tingkat kemandirian keuangan sangat dipengaruhi oleh jumlah PAD. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi pula keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga semakin besar tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung harus berusaha untuk melakukan pengungkapan wajib pada laporan keuangannya.

3. Pengaruh Pendapatan Transfer Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah: Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (Suwanda 2014).

Transfer masuk berupa penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Sedangkan transfer keluar berupa pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Pendapatan transfer pada pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan total pendapatan transfer (Suwanda, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa pendapatan transfer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan bahwa nilai t hitung sebesar 1,216 lebih kecil dari t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih besar dari probabilitas. Maka pendapatan transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018-2020. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah selaku *agent* diharuskan untuk melaksanakan pembelanjaan dana perimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pemerintah pusat sebagai

penyedia dana perimbangan yang tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan meminta suatu bentuk akuntabilitas dari pemerintah daerah. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah akan berusaha mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan transfer yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Suwanda, 2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan transfer berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan transfer memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah akan didorong untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

4. Pengaruh Jumlah OPD Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

Kompleksitas pada pemerintah daerah melalui jumlah OPD dapat menjelaskan pengungkapan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Pada penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah, (Renyowijoyo 2013). Pada kompleksitas pemerintah daerah Jumlah OPD diukur dengan menggunakan jumlah OPD pada (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) yaitu jumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD atau OPD didapatkan dari catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa jumlah OPD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan bahwa nilai t hitung sebesar -1,401 lebih kecil dari t tabel. Sedangkan untuk nilai signifikan lebih besar dari probabilitas. Maka jumlah OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Albab (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara OPD terhadap tingkat

pengungkapan wajib LKPD. Begitu juga menurut penelitian Candra (2015) yang mengatakan bahwa jumlah OPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Semakin besar OPD atau SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan berdasarkan SAP yang sesuai dengan *agency theory*, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap ketentuan perundang-undangan (Halim, 2018).

5. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

Lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2012). Ukuran legislatif pada kompleksitas pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan banyaknya jumlah anggota DPRD. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan mampu mengungkapkan tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan bahwa nilai t hitung sebesar -2.515 lebih besar dari t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas. Maka ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020. Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh penelitian menurut Candra (2015) dan Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat dipergunakan dengan baik.

Berdasarkan teori keagenan pada saat penyusunan LKPD, hasil laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat nantinya harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK (Halim, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa banyaknya jumlah anggota DPRD mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo dengan semakin banyak anggota DPRD yang akan dilantik maka tidak akan menjamin semakin ketat pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam

pembuat-an kebijakan dari sektor penganggaran keuangan pemerintah daerah akan kurang efisien. Karena melibatkan terlalu banyak anggota dewan dalam pembuatan keputusan.

6. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern mau-pun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pratiwi 2016). Dengan adanya temuan ini, BPK akan meminta adanya koreksi dan peningkatan pengungkapannya, Sehingga semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan. Banyaknya temuan audit dapat meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SPSS pada hasil analisis regresi parsial uji t bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini di karenakan bahwa nilai t hitung sebesar 2.501 lebih besar dari t tabel sedangkan untuk nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas. Maka temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

Penelitian Ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh penelitian menurut Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit memiliki pengaruh tetapi negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga dengan adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi kepada pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Karakteristik pemda jika diukur dengan ukuran pemerintah daerah maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
2. Karakteristik pemda jika diukur dengan rasio kemandirian daerah maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
3. Karakteristik pemda jika diukur dengan pendapatan transfer maka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.
4. Komplexitas pemda jika diukur dengan jumlah OPD maka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah

daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

5. Komplexitas pemda jika diukur dengan ukuran legislatif maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020
6. Temuan Audit jika diukur dengan menggunakan jumlah temuan audit maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.

REFERENSI

Buku:

Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua*. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka

Ghozali, Imam, 2011 *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasanah, Nurmalia and Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor:In Media

Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahsun, Muhammad., et al., 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pratiwi, Wiwik. 2016 *Audit Sektor publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi, organisasi sektor publik.*, Bogor:In media anggota IKAPI

Renyowijoyo, Muindro., 2013. *Akun-tansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta:Mitra Wac-ana Media.

Suwanda, Dadang dan Hendri Santoso. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP*. Bandung:PT Remaja Rosda-karya.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung:ALVABETA

Sugiyono. 2018 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung:ALVABETA

Jurnal dan Skripsi:

Albab, Muhamad Ulii. 2019. Pengaruh Karakteristik, Kom-pleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengung-kapan Wajib Laporan Keua-ngan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Peme-rintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016) Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Candra, Maulana. 2015. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa tahun 2013). Skripsi, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Hilmi, Amirudin Zul. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempe-ngaruhi Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi, Fakultas Eko-nomi Universitas Indonesia. Depok.

Khasanah, Nur Lailatul. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012) Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Rahayu, Ayu. 2016. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan) Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Undang-Undangn dan Peraturan Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah